

**IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL  
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA  
AND FLORA OLEH PEMERINTAH PERU DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN PERDAGANGAN  
SATWA LIAR ILEGAL**

**Paramita Maulidya**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya**

Email: [10040221094@student.uinsa.ac.id](mailto:10040221094@student.uinsa.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bentuk-bentuk misimplementasi kebijakan pengendalian perdagangan satwa liar di Peru meskipun kerangka hukumnya telah memadai. Fokus penelitian diarahkan pada kinerja Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre sebagai otoritas administrasi dan ilmiah serta Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria sebagai lembaga kepabeanan. Dengan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan dokumen kebijakan, penelitian menemukan bahwa pemerintah Peru masih sering mengalami kebocoran pengawasan, lemahnya deteksi dini, dan ketidakkonsistenan pelaksanaan di lapangan. Analisis menggunakan kerangka Merilee S. Grindle menunjukkan bahwa permasalahan muncul pada isi kebijakan khususnya keterbatasan sumber daya dan strategi implementasi serta pada konteks pelaksanaan seperti koordinasi antar-lembaga, kapasitas birokrasi, dan kondisi sosial ekonomi lokal. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas implementasi dan membuka peluang kajian lanjutan terkait evaluasi kebijakan satwa liar di Amerika Latin.

**Kata Kunci:** Peru, implementasi kebijakan, satwa liar, misimplementasi; SERFOR, SUNAT, Grindle.

**Abstrack**

*This study aims to describe the forms of misimplementation of wildlife trade control policies in Peru, despite an adequate legal framework. The research focuses on the performance of the National Forestry and Wildlife Service (Servicio Nacional Forestry and Wildlife Silvestre) as the administrative and scientific authority and the National Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) as the customs agency. Using qualitative descriptive*

*methods based on literature and policy document studies, the study found that the Peruvian government still frequently experiences oversight leaks, weaknesses in early detection, and inconsistent implementation on the ground. Analysis using Merilee S. Grindle's framework indicates that problems arise in the content of the policies—particularly limited resources and strategy implementation—as well as in the implementation context, such as inter-agency coordination, bureaucratic capacity, and local socioeconomic conditions. This study emphasizes the need to strengthen implementation capacity and opens up opportunities for further research on wildlife policy evaluation in Latin America.*

**Keywords:** Peru, policy implementation, wildlife, misimplementation; SERFOR, SUNAT, Grindle.

## Pendahuluan

Perdagangan satwa liar ilegal telah menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap konservasi keanekaragaman hayati dunia, terutama di kawasan Amerika Latin, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. Faktanya, aktivitas ilegal ini tidak hanya menghancurkan populasi spesies yang dilindungi tetapi juga memperkuat jaringan kriminal lintas batas, mengganggu stabilitas ekologi, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara asal dan transit. Untuk menghadapi ancaman tersebut, CITES dibentuk sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur pengelolaan perdagangan spesies fauna dan flora agar tidak merugikan kelangsungan hidupnya. Sebagai negara megabiodiverse, Peru memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan implementasi CITES dapat berjalan secara efektif dan konsisten di tingkat nasional. (CITES, 2024)

Peru merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman spesies tertinggi di dunia, mencakup ribuan jenis burung, reptil, mamalia, hingga flora endemik yang bernilai ekologis tinggi. Kekayaan biodiversitas ini sekaligus membuat Peru menjadi sasaran empuk bagi jaringan perdagangan ilegal satwa, baik untuk

konsumsi domestik, pasar gelap regional, maupun permintaan internasional. Untuk menjalankan mandat CITES, Pemerintah Peru telah menetapkan dua lembaga kunci: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) sebagai otoritas administrasi dan ilmiah yang mengatur perizinan serta konservasi spesies, dan Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) sebagai lembaga kepabeanan yang mengawasi lalu lintas barang di perbatasan. Secara formal, kedua lembaga ini telah memiliki dasar hukum, pedoman teknis, dan instrumen administratif yang mendukung penerapan CITES di Peru (Abdul Khakim, 2024). Namun, dalam praktiknya, berbagai laporan menunjukkan bahwa Pemerintah Peru masih sering mengalami “kecolongan” dalam upaya pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar. Penyitaan satwa dilindungi yang terus berulang, jalur-jalur penyelundupan yang sulit dipantau, dan tingginya permintaan terhadap spesies eksotis menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang telah diatur dalam regulasi dan apa yang terjadi di lapangan. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa dokumen perizinan yang dikeluarkan SERFOR tidak selalu selaras dengan data lapangan, sementara pos-pos pemeriksaan yang berada di bawah pengawasan SUNAT kerap kewalahan menghadapi modus penyelundupan yang semakin canggih. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun Peru sudah merespons kewajiban internasional melalui ratifikasi dan regulasi, proses implementasi di tingkat birokrasi dan operasional masih menghadapi banyak hambatan (Mahfud Zubaidi, 2025).

Permasalahan ini menjadi lebih nyata ketika meninjau kesenjangan kapasitas-kelembagaan dan kompleksitas kejahatan lingkungan yang sedang dipertimbangkan. Dengan wilayah hutan yang luas dan sulit dijangkau serta perbatasan yang panjang dan beragam, Peru memiliki wilayah geografis yang luas untuk dipantau. Pemantauan lapangan membutuhkan sumber daya

manusia, keuangan, teknologi, dan koordinatif yang tinggi. Beberapa laporan menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga belum terlaksana dengan baik, data spesies tidak selalu diperbarui, dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat lokal masih terbatas. Kesenjangan tertinggi terdapat pada kesalahan implementasi, di mana suatu kebijakan mungkin telah diberlakukan pada tingkat normatif, tetapi kurang terlaksana dalam bentuk prosedur operasional yang jelas, konsisten, dan relevan di lapangan. Akibatnya, pengawasan lapangan di pelabuhan, bandara, dan jalur darat tidak terstandarisasi, sehingga selalu terdapat risiko tinggi terjadinya penyelundupan.

Dengan kompleksitas masalah yang ada, penelitian mengenai implementasi CITES oleh Pemerintah Peru menjadi penting dilakukan. Secara akademis, penelitian tentang illegal wildlife trade lebih banyak dilakukan dalam konteks Amerika Latin secara umum, tetapi hanya sedikit sumber yang menyoroti secara spesifik bagaimana Peru melaksanakan kewajiban internasionalnya dan mengapa kecolongan masih terus terjadi meskipun struktur regulasi telah dibentuk. Penelitian ini penting tidak hanya karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dari efektivitas tata kelola konservasi satwa di Peru, tetapi juga menambah upaya global dalam memperkuat mekanisme pelaksanaan CITES. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki efektifitas koordinasi antar lembaga, memperkuat kapasitas institusional, serta menutup celah-celah operasional yang selama ini memungkinkan terjadinya mis-implementasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademis dan sekaligus praktis bagi perlindungan satwa liar tingkat nasional maupun internasional.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature*

*review*) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik Implementasi Konvensi CITES Oleh Pemerintah Peru Dalam Upaya Pemberantasan Perdagangan Satwa Liar Ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), dengan tujuan menggambarkan fenomena implementasi kebijakan secara mendalam tanpa manipulasi variabel. Fokus penelitian diarahkan pada konteks Peru, khususnya pada implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* oleh *Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre* sebagai otoritas administrasi dan ilmiah (selanjutnya disebut CITES dan SERFOR), serta oleh *Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria* sebagai lembaga pengawasan kepabeanan (selanjutnya disebut SUNAT) yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar. Data penelitian bersumber dari data sekunder, meliputi dokumen resmi Pemerintah Peru, laporan tahunan CITES, regulasi nasional, laporan lembaga internasional, jurnal ilmiah, serta berita investigatif, yang dilengkapi dengan observasi situasi sosial melalui pemantauan pola kasus penyitaan satwa liar yang muncul di media resmi dan portal lembaga terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, dan observasi situasi sosial, sehingga memungkinkan peneliti menggambarkan dinamika misimplementasi secara komprehensif. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria relevansi langsung terhadap pelaksanaan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* di Peru serta tren perdagangan ilegal satwa liar dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola misimplementasi dan

faktor penyebabnya. Keabsahan data dijaga dengan audit trail dan triangulasi sumber terbatas antar-dokumen resmi, laporan internasional, dan publikasi ilmiah. Seluruh kegiatan penelitian dilakukan dengan mematuhi etika ilmiah, menjaga akurasi sumber, objektivitas analisis, dan integritas akademik.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan diperoleh berdasarkan penelusuran dokumen resmi Pemerintah Peru, laporan tahunan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, publikasi Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, laporan Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, laporan organisasi internasional seperti TRAFFIC dan United Nations Office on Drugs and Crime, berita investigatif media Peru, dan hasil observasi situasi sosial melalui pemantauan tren kasus penyitaan satwa liar selama periode 2015–2025. Data-data yang diperoleh menggambarkan kondisi aktual implementasi kebijakan, dinamika penindakan perdagangan ilegal satwa liar, serta bentuk-bentuk misimplementasi yang terjadi dalam pelaksanaan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora oleh Pemerintah Peru. Temuan ini juga menunjukkan bagaimana prosedur administratif, proses pengawasan, dan respons institusional seringkali tidak berjalan selaras dengan ketentuan normatif yang telah dirumuskan dalam kerangka hukum nasional Peru. (CITES, 2023)

Data pertama yang muncul dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Peru merupakan salah satu negara Amerika Latin yang memiliki tingkat biodiversitas tinggi dan sekaligus mengalami tekanan besar dari perdagangan ilegal satwa liar. Laporan tahunan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora menunjukkan bahwa Peru secara konsisten berada pada kategori negara dengan tingkat penyitaan spesimen

tinggi, terutama untuk kelompok reptil, burung, dan mamalia kecil. Pada tahun 2020 misalnya, tercatat lebih dari dua puluh ribu spesimen satwa liar dan bagian tubuh satwa berhasil disita oleh aparat kepabeanan Peru, dengan sebagian besar berasal dari kawasan Amazon. Tren penyitaan yang tinggi dipandang sebagai indikator bahwa aliran perdagangan ilegal tetap intensif meskipun regulasi nasional dan mekanisme pelaporan telah diperkuat. Data ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah penindakan dan efektivitas pencegahan yang seharusnya menjadi fokus utama implementasi kebijakan. (Mahfud Zubaidi, 2025 )

Data selanjutnya memperlihatkan bahwa Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre sebagai otoritas administrasi dan ilmiah dalam pelaksanaan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora menghadapi problem kapasitas kelembagaan. Laporan internal lembaga tersebut mencatat bahwa hingga tahun 2023, Peru masih kekurangan tenaga ahli fauna liar yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi ilmiah terkait permohonan izin ekspor, impor, atau re-ekspor spesimen. Di beberapa distrik Amazon, rasio petugas lapangan bahkan hanya satu orang untuk wilayah pengawasan yang mencakup lebih dari lima puluh ribu hektare. Kondisi ini mengakibatkan proses pengawasan tidak berjalan optimal dan beberapa permohonan izin yang seharusnya ditolak justru tetap diterbitkan karena keterbatasan data ilmiah atau kurangnya uji kelayakan. Masalah ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang kuat tidak selalu diikuti dengan kapasitas institusional yang memadai. (UNOFCC, 2020)

Dokumen evaluasi kepatuhan yang diterbitkan oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora pada 2021 menunjukkan bahwa Peru termasuk

ke dalam daftar negara yang perlu meningkatkan akurasi pelaporan tahunan. Audit tersebut menemukan bahwa terdapat perbedaan jumlah spesimen yang dilaporkan oleh Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre dengan data penyitaan tercatat di Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria maupun laporan badan penegak hukum nasional. Perbedaan angka kadang mencapai lima belas hingga dua puluh persen dalam satu tahun. Ketidakteraturan data antarinstansi menjadi indikasi adanya ketidaksinkronan koordinasi serta lemahnya mekanisme integrasi data. Data ini juga memperlihatkan adanya misimplementasi pada aspek konten kebijakan, karena ketentuan mengenai akurasi pelaporan tahunan tidak diikuti secara konsisten dalam praktik. (CITES, 2023)

Data lain menunjukkan bahwa otoritas kepabeanan, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, juga diterjang oleh tantangan serupa. Laporan tahunan kepabeanan tahun 2022 mencatat bahwa dari lebih dua ribu pemeriksaan kontainer secara acak, hanya sekitar sepuluh persen di antaranya menggunakan perangkat pemindaian digital yang sesuai standar internasional. Sebagian besar pos pemeriksaan di kawasan Amazon tidak memiliki peralatan apapun atau tergantung pada pemeriksaan manual, sehingga mudah terlewatkan spesimen ilegal. Data-data penyitaan juga menunjukkan kecenderungan bahwa lebih dari enam puluh persen barang bukti ditemukan bukan melalui pengawasan rutin; melainkan dari laporan masyarakat dan operasi gabungan bersifat insidental. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum bekerja maksimal dan tetap bergantung pada respons situasional. (Mahfud Zubaidi, 2025)

Temuan kedua berasal dari laporan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, yang mencatat bahwa jaringan

perdagangan satwa liar ilegal di Peru terorganisir dan memanfaatkan celah administratif. Beberapa laporan investigasi mengungkapkan bahwa para pedagang sering memanfaatkan perbedaan peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama terkait prosedur perizinan untuk penangkaran dan pengangkutan satwa liar. Dalam beberapa kasus, izin palsu atau manipulasi data spesimen teridentifikasi selama proses investigasi. Pola ini menunjukkan bahwa kesalahan implementasi tidak hanya terjadi di tingkat administratif formal, tetapi juga bergantung pada konteks sosial-politik, yang menciptakan ruang bagi praktik korupsi. (UNCAC, 2019) Data yang dihimpun dari organisasi lingkungan independen menunjukkan bahwa Peru menghadapi persoalan minimnya fasilitas penampungan satwa sitaan. Sampai tahun 2024, hanya beberapa pusat rehabilitasi yang berfungsi optimal di Peru dan sebagian lainnya kekurangan tenaga medis, infrastruktur atau dana operasional. Oleh karena itu, satwa sitaan sering terlambat ditangani atau tidak menjalani proses rehabilitasi sesuai standar internasional. Data ini menunjukkan bahwa implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora tidak hanya terkait proses perizinan dan pengawasan, tetapi juga sistem penanganan pascapenyitaan yang menjadi bagian dari kewajiban negara pihak. Temuan lainnya mengarah pada tren meningkatnya perdagangan daring satwa liar ilegal di Peru. Sebuah laporan pada tahun 2023, oleh beberapa organisasi pemantau kejahatan siber, menyatakan bahwa transaksi jual beli satwa liar melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2019. Pemerintah Peru sendiri belum memiliki unit khusus yang secara spesifik menangani pemantauan digital, sehingga ruang digital di negara tersebut masih lemah. Data ini menunjukkan dimensi baru dari perdagangan ilegal yang belum sepenuhnya ditangani oleh kerangka implementasi Convention on

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Dengan demikian, secara keseluruhan, seluruh data yang diperoleh menunjukkan adanya jarak nyata antara ketentuan normatif yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Peru dengan praktik di lapangan. Berbagai temuan mengenai kapasitas institusional yang terbatas, ketidaksinkronan data antarinstansi, lemahnya pengawasan kepabeanan, maraknya manipulasi administrasi, minimnya fasilitas penanganan satwa sitaan, hingga peningkatan perdagangan digital menunjukkan bahwa misimplementasi terjadi pada berbagai aspek. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun Peru telah mengadopsi kerangka hukum dan prosedur administrasi yang sesuai dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, implementasinya masih menghadapi banyak kendala yang menghambat efektivitas pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar. (SUNAT, 2022)

## **Analisis Implementasi Konvensi CITES oleh Pemerintah Peru dalam Perspektif Merilee S. Grindle**

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk misimplementasi dalam pelaksanaan Konvensi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora oleh Pemerintah Peru, khususnya melalui lembaga Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre sebagai otoritas administrasi dan ilmiah, serta Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria sebagai lembaga pengawasan perbatasan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, yang menekankan dua dimensi utama: *content of policy* dan *context of implementation* (Grindle, 1980). Melalui perspektif ini, pembahasan berupaya memahami mengapa implementasi Konvensi CITES di Peru telah dilakukan secara formal, tetapi tetap menghasilkan celah substantif yang menyebabkan tingginya tingkat *illegal wildlife*

*trade.*

Secara normatif, Peru merupakan salah satu negara megadiverse yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan berkewajiban menjaga kelestarian spesies flora dan fauna untuk kepentingan global. Implementasi Konvensi CITES menjadi instrumen penting untuk mengontrol perdagangan spesies yang dilindungi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peru telah mengadopsi standar hukum CITES ke dalam kebijakan nasional dan membentuk struktur kelembagaan pengawasan, praktik di lapangan menunjukkan banyak kelemahan. Fakta mengenai masih tingginya penyelundupan burung, reptil, primata, dan produk turunannya mengindikasikan bahwa persoalan bukan terletak pada norma, melainkan pada lemahnya implementasi. Oleh karena itu, analisis mendalam berdasarkan kerangka *content* dan *context* diperlukan untuk mengungkap akar dari misimplementasi tersebut (Grindle, 1980).

## **1. Analisis Content of Policy**

### **Kejelasan Tujuan Kebijakan**

Secara formal, tujuan kebijakan implementasi Konvensi CITES di Peru cukup jelas, yaitu memastikan bahwa seluruh perdagangan spesies flora dan fauna yang masuk dalam daftar apendiks dilakukan secara legal, terkendali, dan berkelanjutan. Namun, kejelasan tujuan ini tidak diikuti oleh pedoman operasional yang seragam di tingkat lapangan. Banyak petugas lapangan menerapkan interpretasi berbeda mengenai klasifikasi spesies, mekanisme verifikasi dokumen, serta prosedur karantina. Ketidakteraturan interpretasi ini membuat tujuan kebijakan tidak sepenuhnya tercapai meskipun telah tertulis dengan jelas dalam regulasi (Mahfud Zubaidi, 2025).

### **Identifikasi Aktor Pelaksana**

Implementasi CITES di Peru melibatkan Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre sebagai otoritas administratif dan

ilmiah, serta Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria sebagai lembaga pengawasan titik keluar-masuk. Namun, identifikasi peran antarlembaga tidak rinci dan cenderung tumpang tindih. Misalnya, SERFOR berperan sebagai lembaga yang menentukan status spesies dan mengeluarkan izin, tetapi koordinasi teknis dengan SUNAT tidak memiliki mekanisme wajib atau protokol yang mengikat. Hal ini menyebabkan lemahnya komunikasi informasi mengenai daftar terbaru spesies, status kuota, atau peringatan penyelundupan. Ketidakjelasan pembagian tugas ini memperlemah efektivitas implementasi (Grindle, 1980).

### **Dukungan Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor paling signifikan dalam misimplementasi. SERFOR kekurangan tenaga ahli dalam identifikasi spesies, sementara SUNAT kekurangan perangkat pendukung seperti laboratorium cepat atau sistem digital identifikasi DNA. Selain itu, pendanaan untuk operasi lapangan sering kali tidak mencukupi, sehingga proses audit tempat penampungan, kawasan perdagangan, dan titik rawan penyelundupan tidak dapat dilakukan secara rutin. Minimnya sumber daya menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak sejalan dengan standar yang ditentukan oleh CITES (Grindle, 1980).

### **Strategi Implementasi dan Manfaat yang Dijanjikan**

Strategi implementasi yang diadopsi cenderung bersifat administratif, yaitu memastikan dokumen ekspor-impor sesuai standar. Namun, pendekatan ini tidak cukup untuk mengatasi jaringan perdagangan ilegal yang beroperasi secara fleksibel dan adaptif. Masyarakat lokal sering kali tidak mengetahui manfaat konservasi yang dijanjikan pemerintah, sehingga muncul ketidakpedulian terhadap pelestarian spesies. Rendahnya tingkat sosialisasi kebijakan memperlebar jarak antara tujuan konservasi dengan strategi implementasi (Mahfud Zubaidi, 2025).

**Derajat Perubahan yang Dituntut**

Implementasi CITES menuntut perubahan perilaku pada tingkat komunitas, aparat lapangan, dan pelaku ekonomi. Namun, perubahan ini sulit diwujudkan karena tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan intensif dan program pemberdayaan masyarakat. Ketika perubahan yang dituntut terlalu besar tetapi tidak didukung dengan insentif atau perangkat pengawasan, tingkat kepatuhan menjadi rendah. Akibatnya, kebijakan hanya berhasil pada tataran dokumentatif, tetapi lemah dalam efektivitas substantif (Grindle, 1980).

**2. Analisis Context of Implementation****Karakteristik Lembaga Pelaksana**

Karakteristik kelembagaan sangat mempengaruhi implementasi. SERFOR memiliki mandat yang cukup besar, tetapi kapasitas internalnya terbatas. Banyak kantor regional kekurangan tenaga ahli yang mampu mengidentifikasi spesies secara tepat. Sementara itu, SUNAT yang memegang kewenangan pengawasan perbatasan menghadapi persoalan beban kerja tinggi, prioritas institusional pada perdagangan dan pajak, serta keterbatasan unit khusus fauna dan flora. Keterbatasan ini membuat kepatuhan terhadap standar CITES bergantung pada kapasitas individu petugas, bukan sistem kelembagaan (Grindle, 1980).

**Koordinasi Antar-Lembaga**

Koordinasi antara SERFOR dan SUNAT masih lemah, terutama dalam pertukaran data dan proses verifikasi. Tidak adanya sistem data terintegrasi menyebabkan munculnya celah informasi antara izin yang diterbitkan oleh SERFOR dan kontrol yang dilakukan oleh SUNAT. Situasi ini diperparah oleh minimnya kegiatan patroli bersama dan pelatihan lintas lembaga. Ketika koordinasi tidak terstruktur, keputusan lapangan menjadi sangat bervariasi dan membuka peluang kebocoran (Grindle, 1980).

**Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Situasi sosial ekonomi masyarakat Peru, khususnya komunitas pedesaan di kawasan hutan, menjadi faktor penting. Banyak penduduk menggantungkan pendapatan pada penangkapan satwa liar. Dalam kondisi ekonomi sulit, perdagangan satwa liar menjadi alternatif yang cepat menghasilkan. Secara politik, perubahan prioritas pemerintah dari konservasi ke fokus ekonomi membuat anggaran untuk perlindungan fauna menurun. Konteks ini membuat implementasi kebijakan konservasi menjadi tidak stabil (Grindle, 1980).

### **Kepatuhan dan Resistensi Aktor Lokal**

Kepatuhan lokal terhadap CITES rendah akibat lemahnya sosialisasi pemerintah. Banyak masyarakat tidak memahami bahwa spesies tertentu memiliki status dilindungi. Sementara itu, jaringan penyelundupan memanfaatkan ketidaktahuan ini melalui praktik pembelian langsung di lapangan. Resistensi juga muncul karena aturan dianggap menghambat mata pencaharian, sehingga sebagian masyarakat memilih mengabaikan regulasi (Grindle, 1980).

### **4. Analisis Bentuk Misimplementasi**

Menggabungkan analisis *content* dan *context*, misimplementasi implementasi Konvensi CITES di Peru terutama muncul karena lemahnya kapasitas operasional. Aturan sudah ada, struktur birokrasi tersedia, tetapi kualitas implementasi tidak memadai. Celah muncul di:

1. Ketidaksinkronan tujuan dan strategi pelaksanaan
2. Kekurangan sumber daya manusia dan teknis
3. Koordinasi lembaga yang tidak optimal
4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mendukung pelestarian
5. Minimnya legitimasi dan kepatuhan aktor lokal

Kombinasi faktor ini membuat implementasi tidak mencapai hasil substantif, sehingga Peru tetap menjadi salah satu titik rawan

perdagangan ilegal satwa liar (CITES, 2025).

Dengan menggunakan kerangka Merilee S. Grindle, pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan utama implementasi Konvensi CITES oleh Pemerintah Peru bukan terletak pada kualitas hukum, tetapi pada lemahnya eksekusi kebijakan di lapangan. Faktor internal lembaga, koordinasi, sumber daya, kondisi sosial ekonomi, serta resistensi lokal menjadikan implementasi bersifat formal tetapi tidak substantif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga, penguatan koordinasi, digitalisasi pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci mengatasi misimplementasi ke depan (Ma Grindle, 1980).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran UMKM di Indonesia. Digitalisasi keuangan melalui aplikasi akuntansi, platform fintech, dan sistem pembayaran elektronik mampu membantu pelaku UMKM dalam mencatat transaksi secara akurat, mengontrol arus kas, menyusun anggaran berbasis data, serta memperluas akses terhadap sumber pembiayaan. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas laporan keuangan UMKM. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan isu keamanan data. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, penyedia teknologi, dan pelaku UMKM sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan sehingga digitalisasi keuangan dapat menjadi pendorong utama transformasi dan daya saing UMKM di era ekonomi modern.

## Daftar Pustaka

- Abdul Khakim Mahfud Zubaidi. (2025). *Peruvian Government's Strategy Against Wildlife Trafficking: From Intelligence Operations to Strict Law Enforcement*. Islamic State of Sunan Ampel University.
- Aqila, N., & Zubaidi, A. K. M. (2025). Measure's of the Indian Government in Combating Illegal Wildlife Trafficking: A Green Theory Approach from a Post-Positivist Perspective in International Relations Departments. *Loka: Journal of Environmental Sciences*, 2(1), In Press.
- Baker, S. E., Cain, R., van Kesteren, F., Zommers, Z. A., D'Cruze, N., & Macdonald, D. W. (2013). Rough Trade: Animal Welfare in the Global Wildlife Trade. *BioScience*, 63(12), 1–12.
- CITES Secretariat. (2020). *Annual Illegal Trade Report*. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
- CITES Secretariat. (2023). *Implementation and Compliance Reports*. CITES.org.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Grindle, M. S. (1980). Policy Content and Context in Implementation. In M. S. Grindle (Ed.), *Politics and Policy Implementation in the Third World* (pp. 3–34). Princeton University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Ministerio del Ambiente del Perú. (2018). *Ley Forestal y de Fauna Silvestre No. 29763*. Lima: MINAM.
- Ministerio del Ambiente del Perú. (2020). *Plan Nacional Contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 2020–2030*. Lima: SERFOR.
- Moorhouse, T. P., Elwin, A., Perez-Peña, P. E., Perez, D., Solis, S., Zari, L., & D'Cruze, N. C. (2023). The Consumption of Wildlife-

Origin Products and Implications for Demand Reduction in Amazonian Peru. *Global Ecology and Conservation*, 48, 1–15.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.

SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2019). *Reporte Nacional de Fiscalización y Control de Fauna Silvestre*. Lima: Gobierno del Perú.

SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2021). *Informe Técnico de Seguimiento a Implementación CITES en Perú*. Lima: Gobierno del Perú.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

SUNAT – Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2022). *Boletín Estadístico de Incautaciones de Fauna Silvestre*. Lima: SUNAT.

SUNAT – Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2023). *Reporte Oficial sobre Tráfico de Vida Silvestre en Puestos Fronterizos*. Lima: SUNAT.

TRAFFIC International. (2021). *Wildlife Trade in Latin America: Regional Assessment Report 2015–2020*. Cambridge: TRAFFIC.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *World Wildlife Crime Report*. Vienna: UNODC.

UNODC. (2023). *Illegal Wildlife Trade as Transnational Organized Crime: Latin America Report*. Vienna: UNODC.

WWF. (2021). *Peru Illegal Wildlife Trade Assessment*. World Wildlife Fund International.

WWF Perú. (2020). *Jaguar Trade in the Amazon Basin: Threats and Enforcement Gaps*. Lima: WWF.

Yuliani, N., & Suryadi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Lingkungan di Negara Berkembang: Studi Perbandingan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 112–129.

Zubaidi, A. K. M., & Faizal, I. W. (2025). Advancing Energy Transition: Solar PV and Battery Energy Storage Integration in Indonesia–South Korea Cooperation. *Loka: Journal of Environmental Sciences*, 2(4), In Press.

Zubaidi, A. K. M. (2024). The Indonesian Government's Plan to Join BRICS Under the Leadership of Prabowo Subianto. *Journal of Political and Legal Sovereignty*, 2(3), July–Septem